

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Investasi Asing Langsung**

Menurut teori *New Institutional Economics* (NIE), keputusan investor untuk melakukan investasi asing langsung (FDI) tidak semata-mata ditentukan oleh pertimbangan keuntungan dan biaya secara ekonomi, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi di negara tujuan. Dalam pandangan (Williamson Oliver E, 2000), institusi formal seperti sistem hukum, perlindungan terhadap hak kepemilikan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif, memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang aman dan dapat dipercaya. NIE menekankan pentingnya dua aspek utama, yaitu lingkungan kelembagaan (institusional) yang mencakup aturan hukum dan kebijakan, serta struktur tata kelola yang mengatur bagaimana kontrak dijalankan dan dilindungi. Investor asing cenderung hanya akan menanamkan modalnya jika merasa yakin bahwa negara tersebut mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Apabila sistem hukum lemah dan mekanisme penyelesaian sengketa tidak berjalan dengan baik, maka hal tersebut dapat menurunkan minat investor untuk masuk. Oleh karena itu, negara yang ingin menarik investasi asing perlu memperkuat institusi hukumnya, meningkatkan transparansi birokrasi, dan membangun sistem penyelesaian sengketa yang kredibel agar mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Faktor-faktor makroekonomi seperti inflasi, nilai tukar, dan produk domestik bruto, serta stabilitas politik, memainkan peran penting dalam menentukan daya tarik investasi asing langsung (FDI) bagi investor. Kondisi makroekonomi yang sehat, seperti inflasi terkendali, nilai tukar stabil, dan pertumbuhan GDP konsisten, mendukung profitabilitas investasi dengan menjaga biaya yang kompetitif dan mengurangi risiko ekonomi (Anwar, Brilianti, Suhendra, & Ginanjar, 2023; Chandra & Handoyo, 2020; Fuddin & Maulidiyah, 2024). Di sisi lain, stabilitas politik memperkuat kepercayaan

investor dengan menjamin keamanan hukum, perlindungan aset, dan keberlanjutan kebijakan ekonomi, sehingga mengurangi risiko gangguan operasional atau perubahan kebijakan yang tidak terduga (Anwar, Khairiyah, et al., 2023; Henley, 2018; Kurniasih et al., 2023). Kombinasi dari stabilitas politik dan makroekonomi memberikan dasar yang kuat bagi investor untuk berkomitmen pada investasi jangka panjang di suatu negara.

## B. Inflasi

Inflation Effect Theory yang diusulkan oleh Peter Buckley dan Mark Caisson, menjelaskan bahwa inflasi yang tinggi dapat mengurangi nilai riil investasi dan potensi keuntungan, sehingga memengaruhi kepercayaan investor dan arus investasi asing langsung (FDI) di suatu negara (Fuddin & Maulidiyah, 2024). Inflasi secara umum didefinisikan sebagai kenaikan harga-harga barang dan jasa yang terjadi secara menyeluruh. Untuk mengukurnya, penelitian ini menggunakan Consumer Price Index (CPI), yang mencerminkan perubahan rata-rata harga barang dan jasa konsumsi dalam satu periode (biasanya tahunan) dengan basis tahun tertentu (misalnya 2010 = 100) (Shaari, Asbullah, Zainol Abidin, Karim, & Nangle, 2023).

(Fuddin & Maulidiyah, 2024) mengungkapkan hubungan antara inflasi dan Investasi Asing Langsung (FDI) di kawasan ASEAN ini, inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap arus masuk FDI. Meskipun temuan ini bertentangan dengan pandangan umum yang menyatakan bahwa inflasi tinggi cenderung menghambat investasi asing karena meningkatnya ketidakpastian ekonomi, penelitian ini memberikan perspektif berbeda dengan mengemukakan bahwa inflasi dalam tingkat yang masih terkendali dapat diinterpretasikan oleh investor sebagai indikator positif pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena inflasi moderat dapat mencerminkan peningkatan permintaan agregat dan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya menciptakan peluang investasi yang lebih menjanjikan dengan potensi pengembalian yang lebih tinggi bagi investor asing.

Dalam penelitian (OUATTARA, 2024) mengungkapkan, variabel inflasi menunjukkan keterkaitan yang signifikan secara statistik dengan FDI dalam jangka panjang. Hasil analisis kointegrasi Johansen menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif signifikan, yang berarti bahwa peningkatan inflasi justru mendekati positif dengan peningkatan FDI. Hal ini mungkin tampak bertentangan dengan teori ekonomi konvensional yang menganggap inflasi tinggi sebagai hambatan investasi karena mencerminkan ketidakstabilan perekonomian. Namun, dalam konteks Pantai Gading, inflasi bisa mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi atau permintaan domestik yang menarik bagi investor asing. Hal ini menandakan bahwa investor mungkin menafsirkan inflasi secara moderat sebagai sinyal pertumbuhan ekonomi yang potensial, sehingga meningkatkan minat untuk berinvestasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Chandra & Handoyo, 2020) mengungkapkan adanya hubungan negatif antara tingkat inflasi dan Investasi Asing Langsung (FDI). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa inflasi yang tinggi menciptakan kendala bagi perusahaan multinasional dalam menetapkan struktur biaya dan harga produk, yang mengakibatkan ketidakpastian dalam perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan investasi. Tingginya inflasi yang berkelanjutan mendorong perusahaan asing untuk mengurangi alokasi modal mereka di negara tujuan investasi karena meningkatnya risiko ekonomi yang harus dihadapi. Sebaliknya, tingkat inflasi yang rendah dan terkendali menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan prediktif, sehingga lebih diminati oleh investor asing karena memberikan kepastian dalam perencanaan bisnis jangka panjang.

H1: Inflasi berpengaruh negatif terhadap investasi asing langsung.

### C. Nilai Tukar

Dalam penelitian tahun 1991, Froot & Stein memperkenalkan konsep "*Relative Wealth Effect*" untuk menjelaskan hubungan antara apresiasi nilai tukar dan penurunan Investasi Langsung Asing (FDI). Teori ini menyatakan bahwa ketika mata uang domestik suatu negara menguat (apresiasi), biaya

investasi di negara tersebut menjadi lebih mahal bagi investor asing jika diukur dalam mata uang mereka. Sebagai contoh, apresiasi dolar AS terhadap yen Jepang membuat aset di Amerika Serikat lebih mahal bagi investor Jepang, sehingga mengurangi minat berinvestasi. Mekanisme ini diperkuat oleh asumsi pasar modal tidak sempurna, di mana perusahaan multinasional bergantung pada pendanaan internal. Ketika nilai tukar tidak menguntungkan, kekayaan internal investor terdepresiasi, sehingga menghambat kemampuan mereka melakukan investasi (Hasnat, 1999).

(Setyadharma & Fadhilah, 2021) mengungkapkan hubungan negatif dan signifikan antara nilai tukar dan arus masuk Investasi Asing Langsung (FDI) di tujuh negara ASEAN. Penelitian tersebut menemukan bahwa setiap depresiasi nilai tukar sebesar 1% berdampak pada penurunan FDI sebesar 1,25%. Fenomena ini mengindikasikan bahwa investor asing cenderung menghindari negara dengan nilai tukar yang melemah, karena kondisi tersebut dipersepsikan sebagai indikator risiko ekonomi yang tinggi. Meskipun secara teoritis depresiasi nilai tukar dapat menurunkan biaya produksi dan menarik investor yang berorientasi pada *efficiency seeking*, temuan penelitian justru menunjukkan bahwa sebagian besar FDI di kawasan ASEAN lebih didorong oleh motif *market seeking* atau pemenuhan pasar domestik. Hal ini tercermin dari kecenderungan investor yang lebih tertarik pada kondisi nilai tukar yang menguat, karena apresiasi mata uang berkorelasi dengan peningkatan daya beli konsumen di pasar domestik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Awad, 2020) mengenai arus masuk investasi asing langsung (FDI) ke Malaysia, nilai tukar ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap FDI. Secara khusus, apresiasi nilai tukar mata uang lokal atau penguatan Ringgit Malaysia berdampak negatif terhadap arus masuk FDI. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya harga barang dan jasa produksi lokal di pasar internasional, yang pada gilirannya menurunkan daya saing ekspor dan mengurangi minat investor asing, khususnya yang berorientasi pada ekspor (FDI vertikal). Sebaliknya, depresiasi nilai tukar atau pelemahan

mata uang dapat meningkatkan daya saing biaya produksi domestik, sehingga mendorong masuknya FDI, baik yang bersifat horizontal (untuk mengakses pasar lokal) maupun vertikal. Oleh karena itu, nilai tukar menjadi salah satu variabel makroekonomi yang penting untuk diperhatikan dalam penelitian kebijakan guna menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor asing.

H2: Nilai tukar berpengaruh negatif terhadap investasi asing langsung.

#### D. Produk Domestik Bruto

Menurut Keynes dalam *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) merupakan indikator ekonomi makro yang mencerminkan nilai total output atau pendapatan agregat dalam suatu perekonomian. Dalam perspektif teori Keynes, GDP tidak hanya sekadar ukuran statistik, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai komponen permintaan efektif dalam perekonomian. Komponen utama yang membentuk GDP, menurut pandangan Keynes, terdiri dari pengeluaran konsumsi dan investasi yang secara bersama-sama membentuk permintaan efektif. Ketika terjadi peningkatan pada salah satu atau kedua komponen tersebut, akan terjadi efek multiplier yang mendorong pertumbuhan output dan pendapatan nasional secara keseluruhan. Sebaliknya, penurunan dalam permintaan efektif akan mengakibatkan kontraksi dalam aktivitas ekonomi dan penurunan GDP (Keynes, 2018).

Hubungan antara Produk Domestik Bruto (PDB) dan investasi asing langsung dalam penelitian (Paul, Rosid, Xuefeng, & Islam, 2021) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan positif. Berdasarkan analisis data panel dari 205 negara selama periode 1990 hingga 2018, penelitian ini menemukan bahwa peningkatan investasi asing langsung berkontribusi terhadap peningkatan PDB suatu negara. Temuan ini konsisten di seluruh model statistik yang digunakan, yaitu OLS, POLS, Driscoll-Kraay, 2SLS, dan GMM, yang menunjukkan bahwa arus masuk investasi asing langsung dapat memperkuat kapasitas produksi dan memperluas aktivitas ekonomi negara penerima. Artinya, negara-negara yang berhasil menarik investasi asing langsung

cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, terutama dalam hal pembentukan modal dan pengembangan sektor industri, meskipun dalam beberapa model ditemukan dampak negatif terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Secara keseluruhan, investasi asing langsung dipandang sebagai salah satu faktor penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan PDB.

H3: Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung.

#### E. Stabilitas Politik

Regulatory Risk Theory adalah teori yang menjelaskan bagaimana ketidakpastian dalam regulasi dan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi keputusan ekonomi, terutama dalam konteks investasi. Teori ini menyoroti bahwa meskipun suatu negara memiliki stabilitas politik, keberadaan regulasi yang terlalu ketat, sering berubah, atau sulit diprediksi dapat menjadi hambatan bagi investor dan pelaku bisnis. Regulatory Risk Theory digunakan untuk menjelaskan fenomena ketika stabilitas politik tidak selalu berdampak positif pada investasi asing langsung (FDI). Jika stabilitas politik menghasilkan regulasi yang terlalu ketat atau memperketat kontrol pemerintah terhadap bisnis, maka hal tersebut justru dapat menurunkan minat investor asing (Le, Pham, Pham, & Duong, 2023).

Penelitian (Kurniasih et al., 2023) menunjukkan hubungan antara stabilitas politik dan investasi asing langsung (FDI) bersifat positif dan signifikan, terutama dalam jangka panjang. Dalam konteks negara-negara ASEAN Plus Three (APT), stabilitas politik memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan hak milik, serta kebijakan ekonomi yang konsisten dan ramah investasi. Hal ini menumbuhkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modal mereka secara berkelanjutan. Penelitian dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan 1% pada indeks stabilitas politik di APT dapat mendorong peningkatan FDI sebesar 0,0961%. Negara-negara yang memiliki kondisi politik stabil cenderung menarik lebih banyak arus investasi

karena dianggap lebih aman dan memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

(Ajimobi, 2024) mengungkapkan hubungan antara stabilitas politik dan investasi asing langsung sangat erat. Stabilitas politik menciptakan lingkungan ekonomi yang aman dan dapat diprediksi, sehingga meningkatkan kepercayaan investor. Penelitian ini menggambarkan bahwa kondisi politik yang stabil mampu mengurangi risiko terhadap perubahan kebijakan pemerintah, pengambilalihan aset secara paksa, dan terjadinya kerusuhan sipil, yang sering menjadi kekhawatiran utama bagi investor asing. Ketika suatu negara memiliki institusi yang kuat dan tata kelola pemerintahan yang baik, investor merasa lebih yakin bahwa investasi mereka akan aman serta mampu memberikan keuntungan yang konsisten. Sebaliknya, ketidakstabilan politik seperti korupsi, seringnya pergantian pemerintahan, dan konflik sosial menimbulkan ketidakpastian serta risiko yang tinggi, sehingga membuat investor enggan menanamkan modalnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ditekankan bahwa stabilitas politik merupakan elemen kunci dalam menciptakan iklim investasi yang menarik dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan arus investasi asing langsung secara berkelanjutan.

H4: Stabilitas politik berpengaruh negatif terhadap investasi asing langsung.

#### F. Korupsi

Korupsi diartikan sebagai persepsi penyalahgunaan kekuasaan di sektor publik, yaitu praktik-praktik yang mengaburkan integritas pemerintahan dan merusak kepercayaan masyarakat melalui tindakan yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi. Dalam laporan CPI 2024, variabel korupsi diukur dengan mengumpulkan dan menggabungkan persepsi para ahli dan pelaku bisnis mengenai tingkat korupsi di sektor publik melalui *Corruption Perceptions Index* (CPI). Metodologi pengukurannya yaitu, agregasi data dari 13 sumber independen, standarisasi skor ke dalam skala 0-100, serta penghitungan rata-rata untuk mendapatkan gambaran persepsi korupsi di 180 negara dan wilayah (Bevir, 2012).

Teori signaling untuk menganalisis bagaimana informasi dapat disampaikan melalui sinyal guna mengurangi asimetri informasi antara pihak yang memiliki informasi dengan pihak yang tidak memiliki informasi. Dalam konteks ini, *Corruption Perception Index* (CPI) digunakan sebagai sinyal yang merepresentasikan kualitas tata kelola dan integritas suatu negara. Semakin tinggi nilai CPI yang menunjukkan tingkat korupsi yang lebih rendah semakin menggambarkan bahwa birokrasi dan sistem pemerintahan di negara tersebut memiliki kualitas yang baik, sehingga dapat mengurangi risiko investasi bagi investor. Konsep teori signaling ini pertama kali diperkenalkan oleh Akerlof (1970) dalam studinya mengenai pasar dengan ketidakpastian dan informasi yang tidak sempurna, di mana sinyal yang jelas dapat membantu pengambil keputusan, seperti pembeli atau investor, untuk membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi yang tersedia (Anwar, Brilianti, et al., 2023).

Penelitian (Anwar, Brilianti, et al., 2023) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara indeks persepsi korupsi (CPI) dan investasi asing langsung (FDI) di negara ASEAN-5. Tingkat korupsi yang rendah dapat meningkatkan minat investor asing untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Hal ini disebabkan karena negara dengan indeks persepsi korupsi (CPI) yang tinggi menunjukkan tingkat korupsi yang rendah, dinilai memiliki birokrasi yang berkualitas serta kepastian hukum yang baik. Sebaliknya, negara dengan tingkat korupsi tinggi dipandang memiliki risiko investasi yang lebih besar dan efisiensi ekonomi yang lebih rendah. Oleh karena itu, dalam kondisi ekonomi negara berkembang yang sangat bergantung pada masuknya modal asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengendalian korupsi menjadi faktor kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Cung & Nhung, 2020), ditemukan hubungan yang signifikan dan positif antara indeks persepsi korupsi dan investasi asing langsung (FDI) di Vietnam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin pada indeks persepsi korupsi, yang menandakan

peningkatan upaya pemberantasan korupsi dan transparansi, berkontribusi pada peningkatan arus FDI sebesar USD 0,77 miliar. Hal ini membuktikan bahwa semakin rendah tingkat korupsi di suatu negara, semakin besar minat investor asing untuk menanamkan modalnya. Temuan ini memperkuat pentingnya pengendalian korupsi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.

Dalam penelitian (Lestari, Lesmana, Yudaruddin, & Yudaruddin, 2022) dijelaskan bahwa korupsi memiliki hubungan yang kompleks terhadap investasi asing langsung. Meskipun secara statistik korupsi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara langsung terhadap investasi asing langsung, interaksi antara perkembangan sektor keuangan dan korupsi terbukti berdampak negatif terhadap aliran investasi tersebut. Artinya, meskipun suatu negara mengalami kemajuan dalam sektor keuangannya, tanpa diimbangi dengan pengendalian korupsi, potensi masuknya investasi asing langsung justru akan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa investor asing cenderung ragu untuk menanamkan modal di negara-negara berkembang yang meskipun memiliki infrastruktur keuangan yang maju, tetapi masih memiliki tingkat korupsi yang tinggi.

H5: Korupsi berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung.